



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 351170 Palembang – 30126
Website : www.pta-palembang.go.id Email : cs@pta-palembang.go.id

Nomor : 2665/SEK.PTA.W6-A/RA1.5/XI/2025 7 November 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Usulan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun Anggaran 2027

Kepada Yth.
Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2988/DJA.1/RA.1.5/XI/2025 Tanggal 6 November 2025 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027. Maka dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk membuat usulan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagai persiapan penyusunan angka dasar (*baseline*) DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2027, dengan memperhatikan hal-hal sebaiknya berikut :

1. Membuat usulan target kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
 - a. Realisasi capaian kinerja dan anggaran dalam 3 tahun terakhir;
 - b. Memperhitungkan optimalisasi penyelesaian perkara melalui e-court sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1295/DjA/HK2.6/VI/2024;
 - c. Usulan target kinerja dan anggaran Pembebasan Biaya Perkara :
 - 1) Mekanisme perhitungan alokasi Pembebasan Biaya Perkara merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;

2) Perhitungan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama.

d. Usulan target kinerja dan anggaran Sidang di luar Gedung Pengadilan :

- 1) Mekanisme ketentuan pelaksana sidang di luar gedung pengadilan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
- 2) Lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dari kantor pengadilan berjarak minimal 15 kilometer untuk satker diluar pulau jawa;
- 3) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan maksimal 8 orang;
- 4) Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
- 5) Sewa gedung dalam pelaksanaan diluar gedung dapat dilakukan sepanjang gedung tersebut milik pemerintah yang sudah bersifat BLU atau milik swasta;
- 6) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

e. Usulan target kinerja dan anggaran Sidang Terpadu :

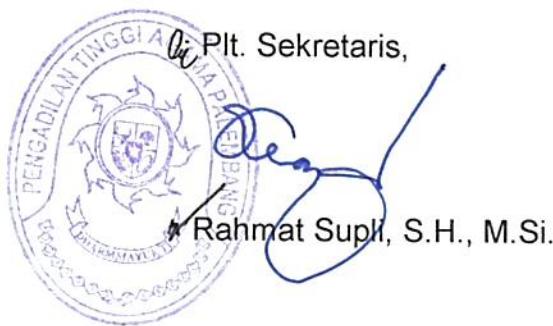
- 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan Sidang Terpadu diharapkan sudah terjalin kerjasama dengan Pemda dalam hal ini Disdukcapil maupun KUA;
- 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang di luar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
- 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

f. Usulan target kinerja dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) :

- 1) Perhitungan besaran target kinerja dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mengacu pada SK Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 067/DJA/OT.01.1/SK/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;

- 2) Menghitung kebutuhan jumlah orang yang dilayani selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran berdasarkan standar biaya keluaran tahun 2025 sesuai lokus masing-masing satuan kerja;
 - 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum;
 - 4) Tidak dapat dialokasikan honorarium Pejabat/Pokja pengadaan barang/jasa.
2. Peningkatan target kinerja dan anggaran yang disampaikan dalam usulan RKA TA 2027 maksimal 20% dari tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan;
 3. Peningkatan target kinerja dan anggaran sebagaimana pada angka 2 menjadi tanggungjawab satuan kerja dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaan tidak mampu merealisasikan maka akan dilakukan pemotongan pada tahun anggaran berikutnya;
 4. Usulan target kinerja dan anggaran dilengkapi data dukung TOR dan RAB disampaikan melalui link berikut :
https://bit.ly/Usulan_BaselineRKASatker_TA2027 dan ke email rpa.ptapalembang@gmail.com paling lambat tanggal 18 November 2025 pukul 15.00 wib.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Arsip.